Hubungan Krisis Iklim dan Konflik Komunal: Analisis Akar Kekekrasan di Sahel

Frequency of International Relations
September, Vol 7 (1) 153 - 171
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track:
Submitted: June, 03 2025
Accepted: August, 01 2025
Available On-line: April, 17 2026

Mutiara Nursukma Wulandari, Debora Fany Ilfi Nurdiana, Marsya Ade Nabila, Zaky Ismail
Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Mutiaranursukma30@gmail.com

Abstract
The Sahel region of Africa has experienced an increase in communal conflict in the last two decades. This research aims to understand the extent to which the climate crisis has contributed to the emergence of violence in the region. Changes in rainfall patterns, prolonged droughts and land degradation have exacerbated struggles over resources such as water and pasture between farming and pastoralist groups. This research uses a descriptive qualitative approach through content analysis. Data sources were obtained from reports of international organizations (such as the UN, FAO, and ICRC), scientific journal articles, and global conflict databases. The data were analyzed to identify patterns of relationships between climate change phenomena and communal conflict dynamics. The results of the analysis show that the climate crisis is not a single cause, but a trigger factor that exacerbates pre-existing socio-economic tensions, such as marginalization of ethnic groups, weak local governance, and unequal access to resources. In other words, the climate crisis acts as a "threat multiplier" that increases the risk of conflict in an already vulnerable region. The research recommends a holistic approach to conflict management in the Sahel, combining climate adaptation policies, inclusive development and strengthening local institutions.

Keywords: Sahel, climate crisis, communal conflict, violence, resources.

Pendahuluan

Krisis iklim saat ini tidak hanya memberikan dampak pada lingkungan, namun juga memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan manusia, khususnya di wilayah-wilayah rentan seperti Sahel. Sahel merupakan wilayah transisi yang membentang dari pantai atlantik hingga laut merah, dan dipisahkan oleh Gurun Sahara di utara dan wilayah Sahara di selatan (Epule et al., 2018). Masyarakat di wilayah ini mayoritas menggantungkan hidupnya dengan sumber daya di sekitarnya sehingga bergantung pada bagaimana kondisi alam, seperti pertanian dan peternakan (Tesfaye, 2022). Perubahan iklim yang makin siginifikan di Sahel yang menyentuh angka 1,5 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan rata-rata global (Dieng, 2022). Hal ini menyebabkan cuaca semakin tidak menentu dan ekstrem, seperti terjadinya kekeringan yang lebih panjang, banjir yang datang tiba-tiba, bahkan datangnya musim hujan yang terlambat dan berakhir dengan cepat. Cuaca yang ekstrem ini memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan masyarakat di Sahel yang mayoritas bergantung pada bagaimana kondisi cuaca di wilayah tersebut.

Banyaknya hasil panen yang menurun, kematian hewan ternak, dan ketersediaan air yang menurun menjadi ancaman yang cukup serius dari krisis iklim ini (Sartori & Fattibene, 2019). Ketika sumber daya menjadi semakin langka, maka akan menciptakan sebuah persaingan antara kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas itu, seperti antara petani dan juga penggembala.

Ketegangan yang bermula dari perebutan sumber daya yang berkembang menjadi sebuah konflik serius antar kelompok. Kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan kelompok penggembala dan merasa terpinggirkan, pada akhirnya akan menjadi sasaran atau bahkan bergabung dengan kelompok bersenjata. Kelompok jihad juga dimanfaatkan dalam ketegangan ini untuk merekrut anggota dan memperluas pengaruh yang mereka miliki di wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh negara (Larémont, 2021). Lemahnya kehadiran negara di pedesaan membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi resmi dan lebih memilih kelompok bersenjata untuk mendapatkan keadilan dan keamanan (Larémont, 2021). Dan ketika cuaca semakin memburuk, tanah menjadi semakin tandus, dan masyarakat tidak mendapatkan perlindungan dari negara, maka para masyarakat akan terdorong untuk melakukan pengungsian bahkan melakukan kekerasan demi bisa bertahan hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam bagaimana krisis iklim berkontribusi sebagai akar dari kekerasan komunal yang terjadi di Sahel. Dan melalui pendekatan yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan politik, penelitian ini akan menunjukkan bahwa krisis iklim dan masyarakat yang dibiarkan tanpa adanya perlindungan dan sumber daya yang memadai, nantinya tidak hanya memperparah konflik yang ada, namun menjadi penyebab utama munculnya jenis kekerasan baru.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif analisis dengan memanfaatkan pendkeatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana hubungan antara krisis iklim dengan konflik komunal yang terjadi di Sahel. Penelitian ini mengandalkan studi literatur dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal akademik dan artikel lainnya yang relevan dan kredibel. Data yang dikumpulkan dianalisis secara tematik dan kontekstual untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan antara perubahan iklim termasuk kekeringan, degradasi lahan, dan kelangkaan air dengan meningkatnya konflik komunal, khususnya antara kelompok petani dan penggembala. Penelitian ini menjunjung tinggi etika ilmiah dengan memastikan penggunaan

referensi yang sah, menjaga objektivitas, serta menyajikan interpretasi yang orisinal.

Hasil

Kondisi Geografis dan Iklim Wilayah Sahel

Secara geografis Sahel merupakan wilayah dengan zona transisi ekologi antara Sahara yang kering di utara dan sabana tropis di selatan, dengan luasnya yang mencapai 5.000 km dari Senegal sampai Sudan. Wilayah ini memiliki curah hujan yang sangat terbatas dengan suhu yang cukup tinggi dan fluaktif. Di tambah wilayah ini didominasi oleh padang rumput dan semak berduri yang hampir menutupi seluruh wilayahnya. Kondisi ini membuat Sahel rentan aka gangguan iklim, hal ini disebabkan karena sistem ekologinya yang berada pada batas minimum produktivitas lahan (Epule et al., 2018). Karena kondisi alamnya yang kering dan rapuh, sedikit saja perubahan suhu atau curah hujan bisa menyebabkan masalah besar seperti gagal panen bahkan kekeringan hebat. Kerentanan yang terjadi akibat kondisi geografis ini dapat menciptakan ketidakstabilan ekologis, sosial, bahkan ekonomi yang kompleks di wilayah ini.

Situasi yang tidak stabil dan cenderung ekstrim dan tidak dapat diprediksi ini dapat memperburuk situasi di Sahel. Dalam beberapa

dekade terakhir, suhu rata-rata di Sahel meningkat sebesar 1- 3°C (Tesfaye, 2022), sehingga kondisi ini berpengaruh pada musim hujan yang semakin pendek bahkan musim hujan yang tidak merata. Kondisi seperti ini lah yang menyebabkan banjir dan kekeringan yang kerap kali terjadi dalam satu tahun yang sama (Cepero et al., 2021). Akibatnya, kondisi ini menciptakan produktivitas tanah yang menurun secara drastis dan sumber daya air yang langka. Perubahan iklim ini merupakan sebuah fenomena fisik yang juga mengganggu ekonomi masyarakat yang pada dasarnyaa bergantung pada sumber daya alam di wilayahnya.

Sebagian besar masyarakat Sahel yang menganggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di wilayahnya seperti bertani, sehingga banyak mengandalkan hujan dan berternak secara berpindah- pindah. Namun, kedua cara ini mecerminkan pada ketergantungan masyarakat terhadap kondisi cuaca. Ketika musim hujan yang datang cenderung lebih pendek, datang terlambat, atau bahkan tidak datang sama sekali, dapat berpengaruh pada panen. Pertumbuhan rumput yang bergantung pada kondisi cuaca di wilayah, dapat mengalami kekeringan jika tidak ada hujan sama sekali sehingga dapat mengancam keberlanjutan perternakan (Tesfaye, 2022). Stunting dan malanutrisi yang terjadi di Sahel juga menjadi cerminan nyata akan rapuhnya ketahanan pangan di wilayah ini (Acosta et al., 2024). Ketergantungan masyarakat terhadap mata

pencaharian yang bergantung pada iklim / cuaca menyebabkan Sahel sangat rentan dan mendorong mereka dalam lingkaran kemiskinan.

Buruknya kondisi di Sahel membuat banyak masyarakat yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Jika dulunya masyarakat melakukan imigrasi secara musiman sebagai bentuk pertahanan diri, namun sistem ini tidak lagi sama dan perpindahan kini dilakukan secara permanen. Tanaman yang tidak lagi bisa diandalkan, banyaknya hewan ternak yang mati, membuat para masyarakat untuk memilih jalan lain dengan mencari kehidupan lain di tempat baru. Namun, fenomena ini tidak secara merata terjadi di masyarakat, masih banyak juga para masyarakat yang terjebak karena kekurangan sumber daya untuk melakukan imigrasi (Cepero et al., 2021). Migrasi yang terjadi di Sahel bukan lagi soal bertahan hidup, namun menjadi cerminan atas ketidaksetaraan akses yang didapatkan untuk bertahan dan beradaptasi.

Selain mengganggu mata pencaharian, perubahan iklim juga berdampak pada ketegangan antar kelompok masyarakat di Sahel, terutama pada petani dan penggembala. Kedua kelompok ini sama-sama bergantung pada kebutuhan lahan dan air dan jika ketersediaan keduanya semakin langka, maka persaingan tidak lagi dapat dihindarkan. Ketika jalur yang biasanya digunakan untuk

penggembalaan tradisional terganggu karena meluanya lahan pertanan, maka akan banyak terjadi konflik antara masyarakat lokal yang disebabkan oleh perebutan sumber daya (Tesfaye, 2022). Konflik yang terjadi bukan karena perbedaan etnis dan agaman, namun dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan dan lemahnya tata kelola sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim memiliki dampak yang cukup signifikan bagi keberlanjutan hidup masyarakat di Sahel, bahkan dapat memperbesar risiko konflik seperti adanya kompetisi atas lahan dan air yang bisa semakin tajam seiring berjalannya waktu. Kondisi di Sahel menjadi cerminan bahwa faktor geografis, perubahan iklim, dan dinamika sosial-ekonomi dapat membentuk sebuah siklus yang sangat kompleks. Kerentanan yang tercipta di wilayah ini bukan hanya bersifat ilmiah, namun juga dapat membentuk kerentanan lain dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih dalam. Semakin langkanya sumber daya seperti lahan dan air juga dapat memicu konflik antar kelompok yang tidak dapat terhindarkan lagi. Kondisi ini nantinya hanya akan memperparah stabilitas sosial akibat adanya persaingan terjadi.

Konfilk Komunal dan Dinamika Sosial di Sahel

Wilayah Sahel menjadi salah satu kawasan yang paling rentan di

dunia, hal ini tidak hanya disebabkan oleh kondisi lingkungan yang ekstrem, tetapi juga disebabkan karena adanya dinamika sosial yang kompleks dan rapuh. Dalam beberapa dekade terakhir, wilayah ini mengalami peningkatan konflik komunal yang melibatkan berbagai kelompok, terutama antara komunitas penggembala dan petani. Ketegangan ini seringkali dipicu oleh perebutan akses terhadap sumber daya alam seperti air, tanah, padang rumput, yang semakin langka keberadaannya akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan (Rose, 2015). Ketergantungan mayoritas penduduk Sahel terhadap mata pencaharian yang berbasis pertanian dan peternakan membuat mereka sangat rentan dalam mengikuti pola perubahan cuaca. Curah hujan menjadi tidak menentu dan musim kering berkepanjangan yang terjadi membuat para penggembala terpaksa bermigrasi dan mencari wilayah yang lebih subur.

Proses migrasi inilah yang membawa mereka masuk dalam area yang telah didiami petani, sehingga menciptakan benturan kepentingan yang berujung pada konflik terbuka. Konflik semacam ini seringkali terjadi yang meluas menjadi kekerasan horizontal yang melibatkan identitas etnis dan agama yang berbeda, yang mampu memperkuat polarisasi ditengah masyarakat (Cepero et al., 2021). Namun, perubahan iklim bukanlah satu satunya pemicu

yang memperburuk krisis ini. Akar dari konflik di Sahel utamanya terletak pada struktur sosial – politik yang timpang, hal ini dibuktikan dengan sejarah marginalisasi pada komunitas tertentu, lemahnya pemerintahan, serta minimnya kehadiran negara di daerah pedalaman (Mbaye, 2022). Tumbuhnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara juga didasari pada ketidakadilan distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik. Di beberapa mayoritas wilayah, komunitas penggembala (pastoral) merasa tidak mendapatkan perlindungan serta representasi yang adil, sementara pengelolaan sumber daya dilakukan secara eksklusif oleh elit lokal atau institusi negara yang tidak responsif (Tesfaye, 2022). Dalam konteks ini, intervensi pembangunan dan program adaptasi lingkungan seringkali tidak mampu menyentuh akar permasalahan. Hal ini dibuktikan dengan, proyek konservasi lahan atau pelestarian hutan yang kerap dilakukan tanpa adanya konsultasi ataupun memberikan kesempatan partisipasi dari masyarakat lokal, bahkan melarang akses masyarakat terhadap sumber daya yang selama ini menjadi penopang bagi kehidupan mereka. Situasi ini justru memberikan peluang untuk menciptakan ketegangan dan memperkuat narasi ketidakadilan yang dapat dimanfaatkan oleh aktor non – negara,

seperti kelompok bersenjata untuk membangun simpati dan merekrut anggota baru dari komunitas yang termarjinalkan (Raineri, 2020).

Adapun beberapa wilayah seperti Lipako – Gourma dan Cekungan Danau Chad yang menjadi titik – titik strategis bagi kekerasan bersenjata. Di wilayah ini, konflik komunal berpadu dengan pemberontakan jihad, perampokan bersenjata, serta hilangnya kendali negara. Hilangnya kendali negara dan institusi penegak hukum inilah yang memungkinkan aktor aktor lokal dalam mengambil alih fungsi fungsi negara. Hal ini seringkali tidak berjalan netral, melainkan mengandung unsur keberpihakan yang dapat memperkuat dominasi kelompok tertentu yang justru memperdalam ketimpangan (Cepero et al., 2021). Di sisi lain, mobilitas yang selama ini dijadikan strategi adaptif oleh masyarakat Sahel menjadi semakin terhambat oleh kebijaksanaan migrasi yang ketat, baik dari negara negara kawasan maupun tekanan eksternal seperti Uni Eropa. Terjadinya migrasi, baik secara internal maupun lintas negara, seharusnya dilihat menjadi sebuah bagian dari ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Ketika mobilitas dibatasi, beban pada komunitas lokal akan meninggal, menyebabkan persaingan atas sumber daya semakin

tajam dan beresiko pada konflik yang semakin memuncak (Cepero et al., 2021). Dinamika sosial di Sahel juga ditandai dengan adanya hubungan yang rapuh antara masyarakat dan negara. Ketika negara gagal dalam memberikan rasa aman, menyediakan layanan dasar, atau menghadirkan keadilan sosiakl, maka legitimasi politik akan menjadi lemah. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh milisi lokal, kelompok keagamaan konservatif, atau bahkan jaringan terorisme internasional, yang dapat menjanjikan perlindungan, keadilan, serta identitas yang tidak dapat diberikan oleh institusi negara. Oleh karena itu, konflik ini tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan pendekatan keamanan saja, melainkan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, penguatan institusi lokal, serta pendekatan berbasis komuniras dalam pengelolaan sumber daya (Mbaye, 2022).

Analisis Keterkaitan Iklim sebagai Akar Konflik di Sahel

Wilayah Sahel yang meliputi Mali, Burkina Faso, dan Niger, mengalami peningkatan suhu yang lebih cepat dibandingkan rata-rata global. Perubahan ini menyebabkan musim tanam menjadi tidak menentu dan sumber air semakin langka. Akibatnya, komunitas petani dan penggembala yang sebelumnya hidup

berdampingan kini bersaing memperebutkan lahan dan air yang semakin terbatas (In & Central, 2023). Ketegangan ini diperparah oleh lemahnya kapasitas negara dalam mengelola konflik dan menyediakan layanan dasar, sehingga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Degradasi lingkungan, seperti penggurunan dan penurunan kualitas tanah, telah mengurangi produktivitas pertanian dan peternakan. Hal ini memicu migrasi internal dan konflik antar komunitas yang berebut sumber daya (Cepero et al., 2021).

Krisis iklim di wilayah Sahel, Afrika, telah menjadi katalisator yang memperburuk konflik komunal yang telah lama berlangsung. Perubahan iklim yang drastis, seperti peningkatan suhu dan curah hujan yang tidak menentu, telah menyebabkan degradasi lahan dan kekeringan. Hal ini memicu persaingan antara komunitas petani dan penggembala yang bergantung pada sumber daya alam tersebut (Freeman, 2019). Di Nigeria, misalnya, penggembala yang terdorong ke selatan karena penggurunan terlibat dalam konflik dengan petani lokal, menyebabkan ribuan kematian dan pengungsian massal. Konflik ini diperparah oleh ketidaksetaraan struktural yang telah berlangsung lama. Di Mali, kebijakan pemerintah cenderung menguntungkan petani, sementara penggembala seperti komunitas

Tuareg dan Fulani merasa terpinggirkan. Kebijakan ini membatasi akses mereka ke lahan penggembalaan, memperkuat rasa ketidakadilan dan mendorong beberapa individu untuk bergabung dengan kelompok bersenjata sebagai bentuk perlawanan. Perubahan iklim juga mempercepat migrasi internal dan antarnegara (Faso, 2020).

Ketika kelompok penggembala mencari padang rumput baru, mereka sering memasuki wilayah petani, yang dapat memicu konflik atas penggunaan lahan dan air. Di Danau Chad, penyusutan danau akibat perubahan iklim telah menggusur jutaan orang, meningkatkan ketegangan dan kekerasan di wilayah tersebut (Republic & Ecology, n.d.). Keterkaitan antara krisis iklim dan konflik komunal di Sahel menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas sosial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup adaptasi terhadap perubahan iklim, reformasi kebijakan lahan yang adil, dan penguatan institusi lokal untuk mengelola konflik secara damai. Krisis iklim di kawasan Sahel bukan hanya sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi pemicu utama yang memperuncing konflik sosial dan memperdalam ketegangan antar

komunitas (Manuscript, n.d.). Perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu, kekeringan berkepanjangan, dan curah hujan yang tidak menentu telah menyebabkan degradasi lahan, menyusutnya sumber air, serta menurunnya produktivitas pertanian dan penggembalaan. Dalam konteks wilayah yang sumber daya alamnya sangat terbatas dan ketergantungan masyarakat terhadap alam sangat tinggi, kondisi ini menjadi ladang subur bagi munculnya persaingan yang berujung pada kekerasan. Komunitas penggembala seperti Fulani, yang secara tradisional mengandalkan mobilitas dalam mencari padang rumput dan air, terdorong untuk masuk ke wilayah-wilayah yang sudah padat oleh petani. Ketika ruang hidup dan mata pencaharian semakin sempit, benturan kepentingan menjadi tak terelakkan. Ketidakseimbangan dalam kebijakan negara yang cenderung memihak pada kelompok tertentu, lemahnya institusi pemerintahan lokal dalam mengelola konflik, serta minimnya respons adaptif terhadap perubahan iklim semakin memperkeruh situasi. Lebih jauh lagi, keterputusan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat memperkuat rasa saling curiga dan memperbesar potensi konflik komunal. Di banyak kasus, ketegangan ini dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis bersenjata yang merekrut anggota dari komunitas yang merasa

terpinggirkan. Mereka memanfaatkan keluhan atas ketidakadilan agraria, eksklusi sosial, dan kekecewaan terhadap pemerintah sebagai alat propaganda dan perekrutan. Inilah yang kemudian menjadikan krisis iklim tidak hanya sebagai penyebab tidak langsung, tetapi juga konflik bersenjata yang lebih kompleks dan berjangka panjang (Benjaminsen et al., 2012).

Kesimpulan

Kawasan Sahel menjadi contoh nyata bagaimana krisis iklim tidak hanya menimbulkan dampak ekologis, tetapi juga memperparah ketegangan sosial dan konflik komunal. Perubahan lingkungan yang ekstrem seperti penggurunan, kelangkaan air, dan rusaknya lahan pertanian telah memicu persaingan antar komunitas atas sumber daya yang kian terbatas, terutama antara kelompok petani dan penggembala. Ketika tekanan lingkungan bertemu dengan struktur sosial yang rapuh, identitas etnis, serta lemahnya kapasitas negara, konflik pun akan mudah meluas dan kian memanas. Keterkaitan antara krisis iklim dan kekerasan komunal di Sahel menunjukkan bahwa masalah perubahan iklim harus dipahami tidak hanya sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai pemicu instabilitas keamanan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pendekatan

multidimensi yang mencakup ketahanan iklim, pengelolaan sumber daya secara inklusif, dan penguatan institusi lokal menjadi krusial dalam merespons tantangan ini**.**

Daftar Pustaka

Acosta, D., Barrow, A., Saidou, I., Assuncao, V. S., Mary, E., & Mckune, S. L. (2024). *Climate change and health in the Sahel : a systematic review*.

Benjaminsen, T. A., Alinon, K., Buhaug, H., & Buseth, J. T. (2012). *Does Climate Change Drive Land-Use Conflicts in the Sahel? January*. https://doi.org/10.1177/0022343311427343

Cepero, O. P., Desmidt, S., Detges, A., & Foong, A. (2021). *Climate Change , Development and Security in the Central Sahel*. *July*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34691.37922

Dieng, A. (2022). *EDITORIAL THE SAHEL : CHALLENGES AND OPPORTUNITIES*. *103*(2021), 765–779. https://doi.org/10.1017/S1816383122000339

Epule, T. E., Ford, J. D., & Lwasa, S. (2018). Climate change stressors in the Sahel. *GeoJournal*, *83*(6), 1411–1424. https://doi.org/10.1007/s10708-017-9831-6

Faso, B. (2020). *The Central Sahel : Scene of New Climate Wars ? April*.

Freeman, L. (2019). *Environmental Change , Migration , and Conflict*

in Africa : A Critical Examination of the Interconnections Environmental Change , Migration , and Conflict in Africa : A Critical Examination of the Interconnections. *June*. https://doi.org/10.1177/1070496517727325

In, C., & Central, T. H. E. (2023). *WATCHLIST INSIGHT : CLIMATE AND HUMANITARIAN*. *June*.

Larémont, R. R. (2021). *Climate Change and Conflict in the Western Sahel*. *64*(4), 748–759. https://doi.org/10.1017/asr.2021.114

Manuscript, A. (n.d.). *Fo r P ee r R ev iew r Fo Pe er Re vie*.

Mbaye, A. A. (2022). *Climate change , development , and conflict-fragility nexus in the Sahel*. *March*.

Raineri, L. (2020). *SAHEL CLIMATE*.

Republic, C., & Ecology, P. (n.d.). *On Current Armed Insurgencies in the Sahel and the Role of Climate Change : Merging Political Ecology and Environmental Security*. *May 2023*, 1–26. https://doi.org/10.32422/cjir-mv.116

Rose, R. M. (2015). *DonnishJournals Region of Africa*. *1*(2), 9–14.

Sartori, N., & Fattibene, D. (2019). *HUMAN SECURITY AND CLIMATE CHANGE . VULNERABILITIES IN THE SAHEL*. *94*, 1–10.

Tesfaye, B. (2022). *Climate Change and Conflict in the Sahel and*

Conflict. *11*.

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan atau publikasi artikel ini.